BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan terhadap pemegang kas rutin pada Dinas Bina Marga Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pengendalian Intern Kas Rutin Pada Pemegang Kas Rutin sudah diterapkan dengan baik, karena Bendaharawan Rutin sudah memeriksa dan mendatanangani bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran uang, sehingga penggunaan dana anggaran rutin dapat dikoreksi data keuangannya.
2. Kas/Bendaharawan Rutin di Dinas Bina Marga telah melakukan tugasnya dengan baik dan selalu menyerahkan surat pertanggung jawaban ke atasan langsung setiap satu periode , ada 3 Bendaharawan yaitu :
   * Bendaharawan umum, ialah bendaharawan yang mengurus seluruh ayat-ayat dan pasal-pasal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. (seluruh penerimaan dan pengeluaran).
   * Bendaharawan Khusus, ialah bendaharawan yang diserahi tugas pengurusan khusus ayat-ayat penerimaan atau pasal pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

     Bendaharawan khusus terdiri dari :

1. Bendaharawan khusus penerimaan, ialah bendaharawan yang diserahi tugas menerima, mencatat, dan melakukan penyetoran dan penerimaan ayat-ayat tertentu ke kas negara, kas dinas atau kas kantor lain yang diserahi pekerjaan ke kas dinas.
2. Bendaharawan khusus pengeluaran, ialah bendaharawan yang diserahi tugas khusus untuk pasal-pasal pengeluaran.

* Bendaharawan Gaji dan Pembuat daftar gaji

Sifat pembayaran gaji tidak sama degan pembayaran belanja barang yang harus disertakan tanda-tanda bukti surat pesanan, berita acara, penerimaan barang, kwitansi penagihan dan sebagainya. Pembuat daftar gaji yang bertanggung jawab atas kebenaran terhadap data gaji yang dibuat dan disertai SPP-nya untuk dijadikan dalam penerbitan SPMU.

3. Dokumen-dokumen Bendaharawan Rutin, yaitu :

* Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 tahun 1985 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dikemukakan bahwa bendaharawan untuk memperoleh uang pembayaran harus mengajukan SPP kepada Kepala Dinas.

* SPP Beban Sementara

Untuk kelancaran kegiatan pemerintah, bendaharawan rutin dengan diketahui oleh atasan langsung dapat mengajukan SPP beban sementara.

* SPP beban tetap

  Lampiran SPP sesuai ketentuan yang berlaku dan SPP ditanda tangani oleh bendaharawan dan atasan langsung.Seluruh laporan dan dokumen-dokumen yang diperlukan telah diarsipkan dengan baik.

4. Melalui adanya hubungan Sistem Akuntansi dengan Pengendalian Kas Rutin maka adanya hubungan yang erat karena Sistem Akuntansi yang berisi prosedur-prosedur dan metode-metode dapat menghasilkan suatu Pengendalian Intern Kas yang memadai, dengan memperhatikan unsur-unsur pengendaliannya yaitu organisasi, otorisasi, dan pencatatan dokumen serta praktek-praktek yang sehat disertai dengan pemeriksaan secara independen.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin akan berguna bagi Dinas Bina Marga, yaitu :

1. Untuk menjamin agar bendaharawan rutin benar-benar telah melakukan tugasnya dengan benar, pengawasan terhadap bendaharawan yang telah ditetapkan dalam perarturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1980 harus benar-benar dilakukan secara transparan.
2. Adanya perkembangan komputer dengan program khusus yang lebih memadai terutama bagian bendaharawan rutin.
3. Kualitasnya, Kedisplinan pegawai khususnya bendaharawan rutin untuk lebih ditingkatkan lagi agar mencapai sasaran dengan optimal.

4. Hendaknya diciptakan lingkungan kerja yang berkesan,tidak menjemukan dan bersifat lebih kekeluargaan serta harus ada batas-batas hubungan kerja yang sehat dan dinamis.